

## Pengembangan Institusi Pendidikan Dalam Era Globalisasi

Zainudin<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darussalimin Nusa Tenggara Barat NTB  
E-mail : [zainudin68@gmail.com](mailto:zainudin68@gmail.com)

### Abstrak

Kaitan antara globalisasi dan pendidikan menurut *Giddens* terletak didalam lahirnya suatu masyarakat baru yaitu “*knowledge-based-society*” yang merupakan anak kandung dari proses globalisasi. Karena globalisasi, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik di dunia ini. Namun demikian suatu “*knowledge-based society*” yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan akan terus-menerus berubah dan merupakan subyek untuk revisi. hal ini memerlukan apa yang disebutnya sikap refleksif dari manusia yaitu kemampuan untuk merenungkan mengenai kehidupannya berdasarkan rasio. Untuk itu pendidikan sangat penting didalam mewujudkan masyarakat masa depan yang berdasarkan ilmu pengetahuan, melalui pendidikan proses transmisi serta pengembangan ilmu pengetahuan akan terjadi. Lahirnya globalisasi , yang kemudian disusul dengan penetrasi teknologi yang sangat canggih, menjembatani bangsa-bangsa didunia ini menjadi *global village*. Globalisasi berkembang melintasi batas-batas keelokan. Dalam kondisi seperti ini dunia mengarah pada proses integrasi dan homogenisasi budaya. Akan tetapi proses integrasi dan homogenisasi ini menimbulkan reaksi yang beragam. Ada berbagai dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap dunia pendidikan, yaitu: Dampak Positif globalisasi Pendidikan dan Dampak negative globalisasi dalam pendidikan. Globalisasi dunia pendidikan mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor, mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh Negara karena mengacu ke Standar Internasional, yang mana bahasa Inggris menjadi sangat penting sebagai bahasa komunikasi, agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini.

**Kata Kunci :** *Pendidikan, Sistem Pendidikan, globalisasi*

---

<sup>1</sup> Zainudin, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darussalimin Nusa Tenggara Barat NTB

## Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia menurut telah memiliki pengalaman bagaimana harus tetap bertahan dalam himpitan arus modernisasi yang kuat tanpa harus kehilangan identitas. Wujud nyata dari pengalaman tersebut adalah adanya upaya untuk mereformasi sistem pendidikan Islam sebagai jawaban atas tantangan kolonialisme dan ekspansi Kristen.<sup>2</sup> Sistem pendidikan Islam yang pada awalnya berbentuk surau<sup>3</sup> dan pesantren,<sup>4</sup> menjelma menjadi dua bentuk lembaga pendidikan Islam modern: pertama, sekolah-sekolah model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam,<sup>5</sup> dan kedua, madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda.<sup>6</sup>

Pengakuan lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional saat ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Sebagai sebuah peluang, karena secara yuridis keberadaan lembaga pendidikan Islam telah diakui keberadaannya, sehingga eksistensinya sangat ditentukan oleh kualitas lulusan yang dihasilkan dan sejauhmana eksebitas lulusannya dapat diterima oleh masyarakat dan dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah tantangan, karena saat ini sistem pendidikan nasional dihadapkan pada persoalan tentang pentingnya standarisasi mutu pendidikan dalam era global, sehingga lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional dituntut merespon kondisi ini.

Namun demikian persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah menyikapi hal tersebut? Menurut Azyumardi Azra,<sup>7</sup> terdapat persoalan berat yang mendesak untuk diselesaikan para pemikir dan praktisi pendidikan Islam terkait dengan madrasah, yakni menyangkut “identitas atau distingsi” Islam pada era milenial. Karena madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, belum secara nyata memiliki

---

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Ciputat: Logos, 2000), 99.

<sup>3</sup> Surau merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang banyak berkembang di daerah Minangkabau Sumatera.

<sup>4</sup> Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah Jawa.

<sup>5</sup> Contohnya, Sekolah Adabiyah yang didirikan Abdullah Ahmad di Padang pada tahun 1909 dan sekolah-sekolah Islam yang didirikan Ormas Muhammadiyah.

<sup>6</sup> Contohnya, Sekolah Diniyyah yang didirikan oleh Zainuddin Labay ElYunusi, madrasah-madrasah yang didirikan oleh organisasi al-Irsyad atau pesantren Mambaul Ulum di Surakarta.

<sup>7</sup> Sebagaimana dikutip dalam tulisan Fatah Syukur, *Madrasah di Indonesia*, 255.

kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran dan desain kurikulumnya. Sehingga pelabelan lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, tidak hanya sekedar diukur dari adanya mushola dan masjid di lingkungan madrasah atau dibacakannya doa “*basmalah*” sebelum kegiatan pembelajaran di mulai. Lebih dari itu, untuk mempertegas madrasah sebagai lembaga pendidikan umum yang berciri khas Islam, perlu rumusan yang secara epistemologis dan aksiologis jelas. Paradigma pengembangan kurikulum yang dikembangkan madrasah harus jelas, pengembangan nilai-nilai pesantren sebagai induk semang madrasah yang relevan tetap dikembangkan di madrasah. Karena madrasah lahir sebagai lembaga konservasi nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan. Namun di sisi lain, madrasah dituntut untuk mengikuti berbagai kebijakan yang didesain Pemerintah sebagai regulasi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Berbagai problem nyata tersebut sekarang sedang dihadapi madrasah. Tanpa ada pemecahan konseptual dan pendekatan secara pragmatis, cepat atau lambat, madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional akan kehilangan jati dirinya, terlebih ketika berhadapan dengan dinamika global yang semakin laten dan serius.

### **Pendidikan Dalam Dinamika Perubahan**

Tidak berlebihan, jika terdapat satu ungkapan yang menyatakan bahwa pendidikan Islam Indonesia telah memberikan warna dan kontribusi terhadap sistem pendidikan nasional. Sjafrli Sairin<sup>8</sup> menegaskan bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia dari masa penjajahan sampai masa kini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Terjadinya dinamika perubahan dalam sistem pendidikan Islam sejak masa penjajahan hingga kini, menunjukkan indikasi yang kuat bahwa pendidikan Islam dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Perubahan tersebut juga menggambarkan bahwa komunitas muslim dapat melakukan pembauran dalam sistem pendidikan Islam yang mereka geluti dengan dinamika yang sedang berkembang di masyarakat saat ini.

Walaupun demikian, terdapat hal yang menarik dicermati terkait bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan dan dinamika perubahan. Menurut Azyumardi Azra<sup>9</sup> para eksponen lembaga-lembaga pendidikan Islam terlihat tidak

---

<sup>8</sup> Sjafrli Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Prespektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 35.

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan” dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta : Paramadina, 1997), xvi.

terlalu tergesa-gesa mentranformasikan perubahan kelembagaan Islam, tetapi cenderung mempertahankan kebijaksanaan yang penuh kehati-hatian, mereka menerima pembaharuan atau modernisasi secara terbatas tanpa harus melakukan perubahan sistem pendidikan Islam secara menyeluruh. Karena sesungguhnya praksis pendidikan di masing-masing lembaga pendidikan Islam memiliki keunikan dan ciri khas, yang secara sosiologis dan filosofis tentu berbeda-beda sesuai dengan tradisi dan disiplin keilmuan yang dikembangkan para pendirinya.

Menurut Affandi Mochtar<sup>10</sup> pendidikan Islam Indonesia, telah menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan Sistem Pendidikan Nasional. Pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam Indonesia diasumsikan dapat menjembatani problem komunikasi antara pemerintah dengan lapisan masyarakat bawah, karena hampir sebagian besar pesantren di Indonesia, tumbuh dan berkembang dari lapisan bawah masyarakat. Kini sebageian besar pesantren lebih terbuka untuk menerima arus modernisasi. Indikasi ini nampak dari adanya berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi pesantren dalam pembangunan. Pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang lainnya kini sangat terbuka dengan berbagai temuan yang dihasilkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada umumnya perlu melakukan telaah secara kritis agar hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi kehidupan manusia. Bukan sebaliknya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa malapetaka bagi eksistensi kehidupan manusia, karena dihegemoni oleh cara berfikir kapitalis dan liberalis yang bebas nilai.

### **Pendidikan Islam Dalam Era Globalisasi**

Milenial merupakan sebuah gerakan dunia yang menghadirkan 2 sisi yang berbeda tetapi saling mempunyai keterkaitan, sebagaimana 2 sisi mata uang yang saling berhubungan. Di satu sisi, milenial telah menghadirkan pemikiran yang mengarahkan dunia menjadi semakin seragam dan terstandar melalui penyesuaian kebudayaan, teknologi, dan perdagangan, yang berasal dari dunia Barat. Tetapi di sisi lain milenial meningkatkan sensitifitas terhadap perbedaan budaya antar bangsa. Milenial berkaitan erat dengan modernisasi, yang dalam perkembangannya telah melahirkan efek-efek positif, misalnya rasionalisasi, standarisasi dan kontrol, namun demikian modernisasi

---

<sup>10</sup> Affandi Mochtar, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam* ( Ciputat : Kalimah, 2001), 77-82.

juga melahirkan efek-efek negatif, misalnya alienasi, ketidakpuasaan, ketidakstabilan atau perubahan yang terjadi secara terusmenerus.

Dalam sebuah artikel yang sangat populer, Samuel Huntington menjelaskan adanya *Clash of civilization*. Dalam sebuah *paper* yang kontroversial tersebut Huntington berargumen bahwa aspek terpenting dalam politik global yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah benturan peradaban. Dengan berakhirnya perang dingin, politik internasional akan meninggalkan fase Barat-nya, dan pusat perhatian berpindah menjadi interaksi antara peradaban Barat dan non Barat dan antar peradaban nonBarat. Suka atau tidak, kekuatan milenial memang telah merangsek dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, dimanapun masyarakat itu berada, termasuk di Indonesia. Penggunaan teknologi “kotak” (handphone, televisi, internet, dan lain sebagainya) menjadikan dunia sangat sempit. Orang dalam hitungan detik dapat melakukan perubahan atau berubah mempengaruhi orang lain, karena pengaruh teknologi komunikasi yang begitu dahsyat. Menurut Imam Barnadib<sup>11</sup> dengan perkembangan informasi yang disebarkan melalui penyebaran informasi yang beraneka ragam, seolaholah manusia “kebanjiran” berbagai informasi, seperti ilmu pengetahuan, iklan-iklan, baik barang maupun hiburan, maka tugas pendidikan adalah menyiapkan peserta didik bukan sekedar sebagai “penerima” informasi tetapi juga “penyeleksi” informasi. Milenial dengan tema “modernitas” yang mengusung gaya hidup kapitalis dan liberalisasi ekonomi menggiring munculnya semangat kompetisi sehingga memposisikan kelompok masyarakat lain sebagai kompetitor bukan sebagai relasi atau mitra kerjasama dalam menghadapi kehidupan.

Apa yang diprediksikan oleh Huntington tentang “benturan budaya” secara perlahan tetapi pasti telah terjadi. Benturan budaya antara budaya “inisiator” milenial dalam hal ini dunia “Barat” dengan budaya lokal dimana masyarakat itu berada tidak dapat dihindari. Pendidikan sebagai bagian dari produk kebudayaan masyarakat juga tidak luput dari pengaruh milenial.

Sebagai negara berkembang, sistem pendidikan di Indonesia rawan dipengaruhi bangsa lain dan mengalami “benturan” ideologi. Menurut Imam Barnadib,<sup>12</sup> Indonesia sebagai negara berkembang berada pada simpang jalan pendidikan. Di satu pihak, tradisi, norma, nilai yang kuat dan mewarnai kehidupan perlu dipertahankan dan

<sup>11</sup>Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Adicita, 2002), 40.

<sup>12</sup> Imam Barnadib, *Dasar-dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Pendidikan* (Bogor: Ghalia Indonesia. 1996), 50.

dikembangkan. Di pihak lain, hal-hal baru perlu diserap hingga menjadi bagian pendidikan. Di sinilah nampak “dilematika” bangsa yang terseret arus milenial sementara penghayatan dan penjiwaan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka terhadap ideologinya sendiri yakni Pancasila masuk dalam kategori yang “memprihatinkan”. Padahal dengan jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa “pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Mensiasati situasi yang demikian, apa yang diperlukan oleh sistem pendidikan Indonesia? Menurut Imam Barnadib<sup>13</sup> pendidikan di Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Karena Pancasila sebagai ideologi dan falsafah terbuka, maka nilai-nilai yang termuat dalam filsafat selain Pancasila yang memiliki relevansi dengan semangat Pancasila dapat diambil dan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sebagai contoh adalah kecenderungan pendidikan di Indonesia yang berdimensi seumur hidup, semesta, menyeluruh dan terpadu. Sementara itu kecenderungan pendidikan di dunia mempunyai isu tentang pengembangan manusia yang berbudaya, memiliki ilmu pengetahuan dan profesional. Isu ini sejalan dengan gejala universal bahwa masyarakat selalu berubah dan berkembang. Maka meminjam istilah Imam Barnadib,<sup>14</sup> agar sistem pendidikan nasional dapat mengikuti perkembangan milenial yang tidak dapat dihindari, maka pola pikir yang dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional adalah *elektif inkorporasi* yang berarti menjadikan Pancasila sebagai penyaring budaya, falsafat maupun ideologi di luar sistem pendidikan nasional yang sedang berjalan saat ini. Oleh karena itu masyarakat modern Indonesia yang sedang timbul, perlu membuat perspektif baru tentang pendidikan di Indonesia yang dapat dilandasi oleh tinjauan kritis dengan menemukan kongruensi teori sumberdaya manusia, revitalisasi dan rekonstruksionisme. Sehingga pada gilirannya sistem pendidikan Indonesia tidak menghasilkan lulusan yang teralineasi dari sistem kehidupan global tetapi dapat melahirkan peserta didik yang memiliki kepribadian dan jati diri sebagai warga masyarakat Indonesia dan dapat berperan serta dalam tatanan kehidupan global.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, 52.

<sup>14</sup> Barnadib, *Dasar-Dasar*, 49.

Paradigma di atas tentu juga berlaku pada sistem pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional Indonesia. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia saat ini, khususnya krisis moral dan mental menjadi poin penting dan keprihatinan bersama, terlebih ketika milenial menuntut adanya pembangunan karakter yang kuat. Bangsa yang lemah hanya akan menjadi sasaran empuk imperialisme modern dengan berbagai produknya baik ekonomi, politik, budaya maupun ideologi.

Sistem pendidikan Islam mestinya mulai menata diri bagaimana menghadapi milenial yang menghadirkan 2 sisi negatif dan positif. Di antara upaya tersebut adalah memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas proses, memperbaiki manajemen dan mereformasi paradigma pendidikan yang berkembang saat ini dengan paradigma organik. Menurut Zamroni<sup>15</sup> paradigma organik bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh: kemampuan intelektual, personal dan sosial. Institusi pendidikan merupakan gabungan berbagai interaksi baik akademik maupun non-akademik semua warga sekolah. Semua anggota sekolah menjadi pembelajar, guru belajar bagaimana melayani murid dengan baik, pimpinan belajar bagaimana mengelola keutuhan antar guru, belajar mensinergikan segala potensi yang dimiliki lembaga. Institusi pendidikan ditempatkan sebagai jaringan sosial bukan individual, sehingga dapat melahirkan energi dan kekuatan yang berpengaruh pada mutu pendidikan.

Implementasi paradigma organik di madrasah sebagai sistem pendidikan Islam tidak dapat ditangani secara parsial atau setengah-setengah, tetapi memerlukan pengembangan pemikiran yang utuh dan aksi nyata secara bertahap dan sistemik. Meminjam istilah yang digunakan oleh sistem penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009, madrasah perlu melakukan evaluasi diri secara jujur dan bertanggungjawab mengenai kondisi riil yang sedang terjadi saat sekarang. Hal ini diperlukan sebagai strategi untuk mengumpulkan, mengalisis, melaporkan kinerja dan memetakan mutu tenaga kependidikan, program kegiatan dan mutu madrasah secara holistik,<sup>16</sup> dengan menggunakan instrumen

---

<sup>15</sup> Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi*, 96.

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan Nasional & Kementerian Agama RI, *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/ Madrasah* (Jakarta: Dikdasmen & Direktorat Pendis, 2009), 21.

indikator standar pelayanan minimal (SPM)<sup>17</sup> yang berjumlah 13 indikator dan standar nasional pendidikan (SNP) yang terdiri dari delapan standar.<sup>18</sup>

Dengan melakukan evaluasi diri madrasah<sup>19</sup> yang jujur dan bertanggung jawab, diharapkan madrasah dapat memetakan berbagai masalah yang dihadapinya, dan pada fase berikutnya madrasah dapat melakukan perbaikan mutu berdasarkan problem yang dihadapinya melalui rencana kegiatan madrasah, dengan menggunakan skala prioritas. Dengan skala prioritas yang telah disusun diharapkan secara bertahap problem yang dihadapi madrasah dapat diperbaiki. Oleh karena itu untuk menyusun evaluasi diri madrasah (EDM) yang baik perlu dilakukan dalam lingkup internal madrasah dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) , dan dilaksanakan oleh tim pengembang madrasah yang terdiri dari unsur kepala madrasah, wakil unsur guru, wakil komite madrasah, wakil orang tua siswa, dan pengawas madrasah.

Proses evaluasi diri madrasah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dengan pembentukan tim pengembang madrasah, pelatihan penggunaan instrumen evaluasi diri madrasah, pelaksanaan evaluasi diri madrasah di madrasah dan penggunaan evaluasi diri madrasah sebagai acuan penyusunan RKM (rencana kegiatan madrasah) dan RAPBM (rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah). Evaluasi diri madrasah (EDM) sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam tata kelola lembaga pendidikan, namun demikian sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009, Evaluasi diri madrasah merupakan salah satu komponen sumber data dalam sistem penjaminan mutu pendidikan.

Ada berbagai dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap dunia pendidikan, yaitu:

#### 1. Dampak Positif globalisasi Pendidikan

a. Akan semakin mudahnya akses informasi. b. Globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang professional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. c. Globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesiabisa bersaing dengan Negara-negarara lain. d. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang

---

<sup>17</sup> Standar pelayanan minimal pada konteks ini berfungsi untuk mengatur apa yang harus tersedia di madrasah dan apa yang harus terjadi di madrasah. Oleh karena itu SPM difokuskan untuk memastikan bahwa setiap madrasah dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik.

<sup>18</sup> Stándar Nasional Pendidikan, meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan dan standar penilaian.

<sup>19</sup> Di dalam EDM (Eluasi Diri Madrasah) terdapat dua puluh enam komponen dan enam puluh dua indikator sebagai tolok ukur untuk menggambarkan kondisi madrasah secara utu

berkualitas dan mampu bersaing e. Adanya perubahan struktur dan system pendidikan yang meningkatkan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan

## 2. Dampak negative globalisasi dalam pendidikan

a. Dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. b. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya “*tradisi serba instant*”.c. Globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. d. Akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar.

Globalisasi dunia pendidikan mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor, mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh Negara karena mengacu ke Standar Internasional, yang mana bahasa Inggris menjadi sangat penting sebagai bahasa komunikasi, agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua elemen diatas tadi dalam menghadapi arus globlisasi dalam dunia pendidikan.1. Pendidik (*Guru*), 2. Peserta didik (*Siswa*), 3. Orang tua (*Keluarga*) dan 4. Lingkungan. Lingkungan tempat tinggal akan berdampak besar pada perilaku dan kepribadian seseorang, karena seringkali pengaruh teman sebayanya dapat mengalahkan pengaruh guru maupun orang tua.

### **Problem Esensial Madrasah Sebagai Institusi Dalam Era Globalisasi**

Terdapat tiga masalah mendasar yang dihadapi madrasah saat ini,<sup>20</sup> antara lain: *pertama*, masalah identitas madrasah.<sup>21</sup> Masalah ini bersumber dari respon madrasah terhadap realitas yang berkembang di masyarakat. Realitas masyarakat Indonesia saat ini, sedang dalam masa transisi sebagai dampak terjadinya proses reformasi. Persoalan demokrasi, hak asasi manusia, pluralitas, kebebasan pers dan milenial menjadi isu utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sementara itu, realitas yang berkembang di madrasah pada umumnya lamban dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat. *Kedua*, masalah sumberdaya manusia internal madrasah dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah ke depan. Mayoritas sumberdaya manusia yang dimiliki madrasah homogen, lulusan perguruan tinggi Islam, kecenderungannya memiliki disiplin keilmuan yang sama. Sehingga pengembangan madrasah menjadi kurang dinamis dan inovatif. Dilihat dari struktur keilmuan yang

<sup>20</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 278-279.

<sup>21</sup> Perlu diingat bahwa kelahiran madrasah di Indonesia merupakan bentuk modernisasi sistem pendidikan tradisional Islam yang berbentuk surau dan pesantren. Oleh sebab itu, seharusnya madrasah harus berpijak kepada nilai-nilai yang dikembangkan oleh model pendidikan tradisional Islam yang relevan, sehingga model tersebut tidak perlu ditinggalkan sepenuhnya.

dikembangkan di madrasah, sudah saatnya keahlian, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan utama dalam melakukan rekrutmen tenaga pendidik di madrasah. Tentu selain beberapa pertimbangan tersebut, para guru juga harus dikenalkan dengan tradisi madrasah sebagai institusi Islam yang dekat dengan tradisi pesantren. Sehingga nilai-nilai pesantren tidak diabaikan. *Ketiga*, masalah pengelolaan madrasah. Menurut H.A.R. Tilaar, persoalan madrasah terletak dari keunikannya bahwa madrasah tumbuh dari bawah, dari masyarakat sendiri.<sup>22</sup> Dalam pertumbuhannya tersebut, madrasah lahir dari komunitas masyarakat yang secara ekonomi berasal dari keluarga tidak mampu, tentu kondisi tersebut menimbulkan situasi serba sulit bagi madrasah. Pengelolaan madrasah yang berorientasi kepada masyarakat telah melahirkan keanekaragaman pengelolaan sehingga sulit untuk dicarikan standar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam menghadapi tuntutan modernisasi dan milenial karena standarstandar tertentu diperlukan maka pengelolaan pendidikan di madrasah perlu disesuaikan agar lebih peka dalam menyikapi kehidupan global yang penuh persaingan.

Terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang relevan dan bermutu merupakan faktor penentu keberhasilan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Karena itu, para pendiri Republik Indonesia menetapkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia dan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.<sup>23</sup> Dalam era milenial ini, sistem pendidikan nasional Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan berat yang menuntut untuk dipecahkan. Persoalan-persoalan tersebut antara lain: persoalan pemerataan, mutu pendidikan, relevansi dan efisiensi.<sup>24</sup>

Sementara itu, menurut H.A.R. Tilaar terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan sistem pendidikan nasional. Indikator tersebut antara lain popularisasi pendidikan, sistematisasi pendidikan, proliferasi pendidikan dan politisasi pendidikan.<sup>25</sup> Isu utama dalam popularisasi pendidikan adalah kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua orang yang populer dengan gerakan *Education for All*.

<sup>22</sup> Tilaar, *Paradigma Baru*, 153.

<sup>23</sup> Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* ( Jakarta : Kompas, 2008), 78-79.

<sup>24</sup> Suyanto, *Reformasi Pendidikan Nasional* ( Jakarta: Komite Reformasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), 4.

<sup>25</sup> Tilaar, *Paradigma Baru*, 64.

Sejalan dengan perkembangan milenial ada kecenderungan beberapa pihak, khususnya pemangku kebijakan pendidikan melahirkan sikap arogansi dengan lahirnya sekolah unggulan, yang secara faktual hanya diperuntukkan bagi kaum elit di masyarakat. Fakta ini nampaknya tidak dapat dipisahkan dengan adanya upaya sebagian pihak untuk melakukan komersialisasi pendidikan dengan berlindung di balik upaya peningkatan mutu pendidikan. Padahal secara yuridis, pemerintah menjamin pembiayaan lembaga pendidikan melalui berbagai kebijakan, antara lain: pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dana alokasi khusus untuk peningkatan mutu pendidikan, dana yang disusun melalui RAPBS, dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, sebenarnya madrasah jauh memiliki peran yang lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Karena hampir sebagian peserta didik yang tidak tertampung di sekolah-sekolah, pada akhirnya memilih madrasah sebagai tempat belajar. Terlepas dari persoalan adanya dugaan dan kecurigaan sebagian pihak yang mengatakan bahwa proses pendidikan di madrasah tidak bermutu dan input pendidikannya rendah, namun kesediaan madrasah untuk menerima anggota masyarakat turut dalam proses pembelajaran merupakan poin penting dalam mewujudkan gerakan *education for all*.

Indikator kedua tentang perkembangan sistem pendidikan nasional adalah sistematisasi pendidikan. Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan yang menyertainya merupakan upaya pemerintah untuk menyeragamkan praktek pendidikan di Indonesia agar menghasilkan perencanaan dan manajemen pendidikan yang efisien, memudahkan supervisi, mewujudkan kesatuan bangsa dan memudahkan pengontrolan mutu pendidikan secara nasional. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, sistem pendidikan nasional yang kaku, menutup pintu bagi lahirnya inovasi-inovasi dan eksperimen-eksperimen konsep pendidikan. Pendidikan swasta yang menjadi pilar pendidikan nasional, ruang geraknya dibatasi karena adanya berbagai regulasi yang mengatur praksis pendidikan, terutama terkait dengan kebijakan implementasi standar nasional pendidikan.

Indikator ketiga tentang perkembangan sistem pendidikan nasional adalah proliferasi pendidikan. Keberlangsungan pendidikan dalam suatu bangsa sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama tri pusat pendidikan. Bukan monopoli lembaga pendidikan formal. Sejalan dengan perkembangan arus modernisasi, nampaknya dunia usaha dan industri mempersyaratkan adanya kepemilikan ijazah sebagai syarat untuk memasuki

dunia usaha dan industri. Sehingga ukuran seseorang layak diterima di sebuah perusahaan dan industri dilihat dari kepemilikan ijazah.

Sementara itu, lembaga yang berhak mengeluarkan ijazah adalah lembaga pendidikan formal. Hal yang demikian sebenarnya juga ada sisi positifnya, namun juga melahirkan sisi negatif, karena mengabaikan aspek ketrampilan dan kepribadian. Banyak dari mereka yang memiliki ijazah pendidikan formal tetapi tidak memiliki ketrampilan dan kepribadian.

Kepentingan masyarakat cenderung diabaikan, karena pendekatan informal yang membentuk peserta didik tidak diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi karakter peserta didik. Makna pendidikan dipersempit pada aspek *schooling*. Institusi pendidikan dianggap sebagai tempat untuk memproduksi peserta didik. Perkembangan kepribadian dan pembentukan karakter menjadi hal yang kurang diperhatikan. Berbeda dengan institusi pendidikan pada umumnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, lebih peduli terhadap perkembangan kepribadian dan akhlak mulia. Sekalipun banyak sorotan yang dialamatkan kepada madrasah karena dianggap gagal menjalankan perannya sebagai lembaga formal Islam. Namun demikian upaya madrasah untuk memberikan pengalaman hidup beragama secara nyata kepada peserta didiknya cukup dijadikan indikator, bahwa pembelajaran di madrasah mempunyai perhatian yang kuat terhadap pembentukan kepribadian tetapi kurang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pendidikan semakin berat.

Sementara pemerintah sendiri kekurangan biaya untuk mengurus pendidikan. Hal ini nampak dari besarnya persentasi pendidikan terhadap PDB yang dialokasikan untuk pendidikan.<sup>26</sup> Jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia maka kemampuan Pemerintah Indonesia untuk membiayai pendidikan sangat minim, hanya 1,4 persen.<sup>27</sup> Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional tentu patut diperhatikan karena selama ini dapat membiayai pendidikan secara mandiri walaupun sebenarnya negara mempunyai kewajiban untuk membantu madrasah. Wajar jikalau kemudian kualitas pendidikan di madrasah masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Terbatasnya sumberdaya manusia dan minimnya sarana pendukung kegiatan pembelajaran telah menjadi bagian persoalan yang akrab dengan kondisi madrasah.

<sup>26</sup> Soedijarto, *Landasan dan Arah*, 82.

<sup>27</sup> Bandingkan dengan negara-negara berikut: Vietnam 2,8, Sri Lanka 3,4, Filipina 3,4, Brunai 4,4, Thailand 5,0, India 5,1, Malaysia 5,2, Korea Selatan 5,3 Jepang 7,3 persen.

Indikator yang keempat dari perkembangan sistem pendidikan nasional adalah politisasi pendidikan. Selama kurun pemerintahan Orde baru, pendidikan telah dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan kekuasaan. Sehingga pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara sentralistik, mengabdikan kepada kekuasaan, dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Sakralisasi ideologi negara dijadikan sebagai alat untuk mengekang lahirnya pemikiran kritis yang menjadi tujuan utama pendidikan. Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional juga terkena dampak dari adanya politisasi pendidikan. Hal ini nampak dari adanya indoktrinasi P-4 yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk Madrasah

### **Penutup**

Lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional saat ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Sebagai sebuah peluang, karena secara yuridis keberadaan lembaga pendidikan Islam telah diakui keberadaannya, sehingga eksistensinya sangat ditentukan oleh kualitas lulusan yang dihasilkan dan sejauhmana eksebitas lulusannya dapat diterima oleh masyarakat dan dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam suasana yang represif sistem pendidikan Islam Indonesia justru tumbuh dan berkembang dengan subur, bak jamur yang tumbuh di musim penghujan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni pemerintahan kolonial Belanda.

Sebagai negara berkembang, sistem pendidikan di Indonesia rawan dipengaruhi bangsa lain dan mengalami “benturan” ideologi. Indonesia sebagai negara berkembang berada pada simpang jalan pendidikan. Di satu pihak, tradisi, norma, nilai yang kuat dan mewarnai kehidupan perlu dipertahankan dan dikembangkan. Di pihak lain, hal-hal baru perlu diserap hingga menjadi bagian pendidikan. Di sinilah nampak “dilematika” bangsa yang terseret arus milenial sementara penghayatan dan penjiwaan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka terhadap ideologinya sendiri yakni Pancasila masuk dalam kategori yang “memprihatinkan”. Padahal dengan jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa “pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

## Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Ciputat: Logos, 2000.
- Azra, Azyumardi. “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan” dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- A. Steenbrink, Karel. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Barnadib, Imam. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Adicita, 2002.
- Barnadib, Imam. *Dasar-Dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Pendidikan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 1996.
- Buchori, Mochtar. “Posisi dan Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Umum,” *Makalah: Seminar Nasional*. IKIP Malang, 24 Februari, 1992.
- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Drewes, G.W.J.. *An Early Javanese Code of Muslim Ethics*. The Hague: KITLV Nijhoff Bibliotheca Indonesia, 1978.
- Kementerian Pendidikan Nasional & Kementerian Agama RI. *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Dikdasmen& Direktorat Pendis, 2009.
- Maftuh Basuni, Muhammad. “Pendidikan Agama Belum Capai Tujuan,” *Tempo*, 24 November 2004.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Malik Fadjar, A. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1998.
- Mas’ud, Abdurrahman. “Sejarah dan Budaya Pesantren” dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. ed. Ismail SM, et al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mochtar, Affandi. *Membedah Diskursus Pendidikan Islam*. Ciputat: Kalimah, 2001.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: LeKDIs. 2005.

- Sairin, Sjafri. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Suroso, Djarot S. *Pendidikan Nasional di Indonesia*. [http:// www.scrib.com/doc/6480664 /Milenial-Pendidikan#](http://www.scrib.com/doc/6480664/Milenial-Pendidikan#)
- Suyanto. *Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Komite Reformasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Syukur, Fatah. “Madrasah di Indonesia: Dinamika, Kontinuitas dan Problematika” dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. ed. Ismail SM., et al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Bandung: Rineka Cipta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Wahid, Abdul. “Manajemen Berbasis Madrasah: Ikhtiar Menuju Madrasah yang Mandiri” dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. ed Ismail SM et.al Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Zamroni. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi:Prakondisi menuju era Milenial*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.